

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan dana belanja sosial terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan *data envelopment analysis* yang didukung oleh pendekatan analisis model-model ekonometrika diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

- 1) Hasil DEA membagi Kabupaten Kota ke dalam kategori efisien dan tidak efisien dimana terdapat 39 DMU yang terangkum pada 16 Kabupaten Kota mampu mencapai skor efisiensi yang efisien. Kota Depok dan Kota Cimahi merupakan 2 daerah yang efisien sepanjang periode penelitian.
- 2) Penggunaan dana belanja sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan ketimpangan pendapatan. Namun, model menunjukkan bahwa semakin tinggi penggunaan dana belanja sosial akan meningkatkan tingkat kemiskinan dengan pengaruh yang signifikan
- 3) *Government size*, tingkat pengangguran terbuka, indeks pendidikan memiliki pengaruh signifikan dalam memperbaiki skor efisiensi, Indeks kesehatan dan investasi memiliki pengaruh signifikan namun meningkatkan inefisiensi

Sedangkan indeks daya beli tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perbaikan skor efisiensi.

5.2. Saran

Secara keseluruhan, penyebab tidak efisiennya skor efisiensi yang dicapai oleh sebagian besar Kabupaten Kota berdasarkan analisis DEA, hanya dikarenakan karena tidak maksimalnya pencapaian pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan indeks gini yang diperoleh oleh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat dalam menggunakan sejumlah dana belanja sosial yang dimiliki. Berikut merupakan saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil analisis penelitian untuk memperbaiki efisiensi penggunaan dana belanja sosial terhadap capaian pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat:

- 1) Melaksanakan program-program kegiatan di masing-masing Kabupaten dan Kota melalui perencanaan yang matang dan terukur dengan tata kelola yang baik (The World Bank, 1998). Disamping itu Perencanaan yang disusun harus memperhatikan aspek ketepatan sasaran dari berbagai program yang akan dijalankan.
- 2) Mengejar peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dengan meningkatkan rasio *government size* yang selanjutnya diterapkan melalui program-program yang mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, baik itu dari sektor pendidikan dan kesehatan. Hal itu diharapkan mampu meningkatkan upah layak bagi masyarakat

terutama masyarakat berpenghasilan rendah sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan

- 3) Memperbaiki iklim investasi dan pasar tenaga kerja untuk mendorong kemampuan daya beli.